BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional *(Sociology of international relations).* Jadi, ilmu hubungan internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya (Schwarzenberger dalam Perwita dan Yani, 2005 : 1). Sedangkan Mc. Clelland dalam Perwita & Yani mendefinisikan Hubungan internasional sebagai suatu studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mc. Clelland dalam Perwita dan Yani, 2005 : 4).

Pola hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara-negara (*state-actors*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau konflik (Rudy, 2003 : 2)

Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Pada umumnya studi hubungan internasional merupakan suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Hubungan internasional pada masa

lampau berfokus pada kajian mengenai perang dan damai serta kemudian meluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antarnegara atau antar bangsa dalam konteks sistem global akan tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang lazim disebut "*high politics*". Sedangkan hubungan internasional sekarang ini selain tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antarnegara atau antar bangsa yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara, juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*).

Berakhirnya perang dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca perang dingin, isu-isu hubungan internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) (Perwita dan Yani,2005:7).

Interaksi internasional tidak saja terjadi oleh satu interaksi tetapi oleh beberapa interaksi dari negara-negara lain dalam memperjuangkan kepentingan nasional dari negaranya masing-masing. Bila suatu aktor negara melakukan suatu hubungan dalam dunia internasional, negara tersebut melakukan sebuah interaksi yang disebut Interaksi Internasional. Pola interaksi ini didasarkan karena adanya hubungan antara negara dengan dunia internasional dimana negara tersebut perlu mengakomodasi kepentingan-kepentingannya di lingkup internasional tersebut.

Dalam interaksi internasional, terbentuk suatu interaksi yang berdasarkan kepada banyaknya pihak yang melakukan hubungan tersebut, antara lain dibedakan menjadi hubungan bilateral, trilateral, regional, dan multilateral atau internasional. Pola-pola yang terbentuk dalam proses interaksi, dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan dari pihak-pihak yang melakukan hubungan timbal balik tersebut, yang dapat dibedakan menjadi sebuah pola kerjasama, pola persaingan, dan pola konflik (Perwita dan Yani, 2005 : 42).

2.1.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan cara yang ditempuh oleh suatu negara dalam rangka untuk mengejar dan mendapatkan kepentingan nasionalnya melalui hubungan yang dibangun dengan negara lain. Dalam melakukan politik luar negerinya, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh sebuah negara. Pertama, sebuah negara menetapkan semua tujuan dan kemana arah politik luar negerinya, serta mengumpulkan data-data penting seperti bagaimana kemampuan negaranya, kondisi dunia luar saati ini dan lainnya. Kedua, perumusan kebijakan dalam politik luar negeri untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya, biasanya hal ini akan dipengaruhi oleh faktor dalam negeri. Ketiga, keluarnya suatu kebijakan yang nantinya akan diterapkan, dimana dalam kebijakan terdapat serangkaian tindakan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan negara. Berikutnya negara akan melaksanakan politik luar negeri berdasarkan pada rumusan yang telah dibuat, hal ini dilakukan dengan cara berhubungan dengan dunia luar, maka pasti akan muncul kemampuan baru sebuah negara dan tujuan lain yang hendak dicapai

kembali, yang kemudian akan kembali pada proses awal yaitu *information assessment* (Perwita dan Yani, 2005: 60).

Negara yang memiliki lingkungan yang strategis pasti akan memiliki politik luar negeri yang berbeda, begitu juga dengan keadaan negara tujuan dimana politik luar negeri tersebut dilaksanakan, akan mempengaruhi perumusan politik luar negeri negara lain (Perwita dan Yani, 2005: 62-63).

Pengertian dasar dari Politik luar negeri ialah *'action theory'*, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar Negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional memegang peranan penting bagi para pengambil keputusan untuk sebuah negara dalam melakukan politik luar negerinya dan menentukan arah, sikap, dan tujuan politik luar negeri negara tersebut. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda untuk dipenuhi. Dalam penelitian ini, yang menjadi kepentingan nasional Afrika Selatan adalah meningkatkan sektor pariwisatanya melalui momentum Piala Dunia FIFA 2010. Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan *(decision makers)* masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah

kebijakan luar negeri *(foreign policy)* perlu dilandaskan pada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai Kepentingan Nasional (Rudy, 2003: 116).

Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup *(survival)* dalam politik internasional. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita dan Yani, 2005: 35).

Dalam interaksi antarnegara, interaksi dilakukan didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional adalah tujuan utama dan merupakan awal sekaligus akhir perjuangan suatu bangsa (Perwita dan Yani, 2005: 41).

2.1.4 Diplomasi

Diplomasi dapat diartikan sebagai manajemen relasi diantara negara-negara melalui negosiasi. Negosiasi yang dimaksudkan di sini biasanya berupa negosiasi terhadap pembuatan suatu perjanjian atau persetujuan eksekutif, atau

tawar menawar dengan negara lain dalam persetujuan yang ingin dicapai sesuai kepentingannya masing-masing. Diplomasi itu sendiri merupakan alat bagi suatu negara untuk melaksanakan politik luar negeri. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, negosiasi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait (Djelantik, 2008: 4).

Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa halangan birokratis. Media massa modern telah menegaskan ide "diplomasi tanpa diplomat". Perkembangan lain adalah peranan media massa dalam mengatur *setting* dan mekanisme diplomasi. Media sering kali dianggap baik sebagai penunjang maupun penghambat diplomasi. Peranan mereka melalui penyiaran, melalui satelit, sangat membantu dalam menyediakan dan sebagai negosiator (Surya, 2011 : 58).

Pentingnya media dan opini publik dalam urusan-urusan internasional menjadi intensif bagi para pemimpin untuk semakin memperlihatkan diri di depan konstituennya sebagai bagian dari upaya propaganda. Diplomasi pada tingkat tertinggi ini semakin dipolitisasi dimana parlemen menginginkan informasi mengenai kebijakan luar negeri secara rinci (Surya, 2011 : 52). Diplomasi dapat juga berarti cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan antar negara (Mauna, 2000: 465).

Revolusi komunikasi telah menggantikan posisi perwakilan negara dan diplomasi dan media komunikasi memberikan dampak terhadap opini dunia dan efek yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh *ambassador* atau diplomat. Diplomasi saat ini dijalankan melalui media seperti televisi atau hal-hal yang dekat dengan publik serta sering didengar dan dibaca oleh publik. Sebagai tambahan, *image* negara dan *image* dari pemimpinnya menjadi hal yang sangat penting, karena di zaman demokratisasi setiap kebijakan luar negeri akan diperbincangkan oleh masyarakat internasional (Goldstein dalam Surya, 2011 : 56).

2.1.4.1 Diplomasi Publik

Perkembangan diplomasi dibagi menjadi dua, yakni diplomasi tradisional dan diplomasi modern. Dalam era global yang telah modern seperti sekarang ini, penggunaan diplomasi lebih banyak menggunakan diplomasi modern daripada diplomasi tradisional. Dikarenakan semakin hari perkembangan dunia semakin kompleks, dan saat ini aktor-aktor yang terlibat tidak hanya negara saja namun sudah banyak melibatkan aktor non negara seperti individu, kelompok, organisasi baik nasional maupun internasional. Ditambah saat ini negara tidak hanya bersaing kredibilitas dengan negara lain saja, namun juga dengan media massa, *corporation*, *NGO*, *I-NGO* dan berbagai kelompok kepentingan yang ada (Nye, 2004 : 106).

Isu utama diplomasi publik adalah arus transnasional dan ide-ide, kepentingan nasional dipromosikan dengan berbagai upaya untuk menyebarkan saling pengertian, informasi, dan mempengaruhi masyarakat asing (Djelantik,

2008 :19). Mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor yang sangat penting yang berpengaruh terhadap perkembangan diplomasi adalah revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Kecepatan dan kemudahan transportasi dan komunikasi telah mengurangi peranan diplomat. Perkembangan media elektronik dan teknologi informasi telah mengurangi pentingnya diplomat dalam mengumpulkna informasi, dan dalam kecepatan pengambil keputusan bereaksi secara segera terhadap peristiwa internasional melalui saluran diplomasi tradisional (Carlsnaes, 2002 : 215-217).

Diplomasi Publik adalah komunikasi antar masyarakat agar mereka mengetahui, memahami, dan kemudian menyetujui pesan yang disampaikan oleh negaranya (Susetyo dalam Shoelhi, 2011 : 158). Diplomasi publik memungkinkan masyarakat, baik secara individu maupun dalam kelompok yang dibentuk oleh pemerintah, untuk berperan dalam memberi masukan bagi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri. Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan (Djelantik, 2008 : 191).

Diplomasi memegang peran penting dalam merajut persaudaraan dan kerja sama antar bangsa. Diplomasi publik merupakan sebuah kebutuhan dalam mengembangkan politik diplomasi yang lebih menyentuh aspek sosial budaya guna melahirkan sikap saling percaya dan saling mengerti sebagai landasan untuk bekerja sama satu sama lain (Shoelhi, 2011 : 162).

Mark Leonard menilai bahwa terdapat empat tujuan yang dapat dicapai dengan adanya diplomasi publik. Pertama, meningkatkan rasa kekeluargaan

dengan negara lain, dengan cara membuat mereka memikirkan negara lain, memiliki citra yang baik terhadap suatu negara. Kedua, meningkatkan penghargaan masyarakat kepada negara tertentu, seperti mempunyai persepsi yang positif. Ketiga, mengeratkan hubungan dengan masyarakat di suatu negara, contohnya dengan cara pendidikan ke dalam kerja sama ilmiah, meyakinkan masyarakat di suatu negara untuk mendatangi tempat-tempat wisata, menjadi konsumen produk buatan lokal, pemberi pengetahuan mengenai nilai-nilai yang dijunjung oleh aktor. Keempat, mempengaruhi masyarakat di negara lain untuk berinvestasi, dan menjadi *partner* dalam hubungan politik (Leonard, 2002 : 9).

Fletcher of the Edward R. Murrow Center for Public Diplomacy, Tufts University mendefinisikan diplomasi publik berhadapan dengan pengaruh, sikap publik atas pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, yang meliputi hubungan internasional diluar diplomasi internasional, perkembangan opini publik di negara lain, interaksi dari kelompok swasta dan kepentingan di suatu negara terhadap negara lainnya, pemberitaan masalah-masalah luar negeri dan dampaknya terhadap kebijakan, komunikasi antara para diplomat dan koresponden asing dan proses dari kultural komunikasi, pusat dari itu semua adalah arus transnasional atas informasi dan ide-ide (www.publicdiplomacy.org/1html diakses pada 10 Maret 2016).

Dalam diplomasi publik biasanya dilakukan upaya dengan membentuk jaringan komunikasi sebagai wadah promosi hingga ke luar negeri, karena pada umumnya komunikasi internasional memanfaatkan komunikasi massa yang

tersebar melintasi batas negara dan memiliki struktur jaringan komunikasi tertentu (Shoelhi, 2012 : 3).

Dalam prakteknya diplomasi publik tidak selalu berjalan mulus, Nye menyebutnya sebagai `*paradox of plenty*` yang dapat diuraikan dalam empat hal, pertama, perlu untuk mengetahui persepsi dan sikap publik global terhadap suatu negara tertentu mengingat pasca Perang Dingin banyak terjadi realiansi politik dan ekonomi. Kedua, transparansi media komunikasi membuat kelompok sasaran tidak terbatas pada satu negara saja, tapi berada pada tataran global. Ketiga, menurunnya kredibilitas pesan yang ada dalam proses diplomasi publik. Masyarakat cenderung mempersepsikan apa yang dikomunikasikan oleh pemerintah sebagai bentuk propaganda. Keempat, Muncul banyak saluran komunikasi yang membutuhkan peninjauan ulang terhadap model komunikasi apa yang mesti digunakan (Nye, 2004: 107).

Diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuknya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak. Meski diplomasi tradisional telah gagal, diplomasi publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur pertama itu, tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antarpemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar

pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri yang biasa disebut diplomasi multijalur atau *Multi-track Diplomacy*. *Multi-track Diplomacy* pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja konseptual dalam memandang proses perwujudan perdamaian internasional sebagai sebuah sistem kehidupan yang ideal. Semuanya tercakup dalam sebuah model jaring-jaring yang saling terkait antara individual, institusi dan komunitas yang bekerja bersama untuk satu tujuan tunggal yaitu perdamaian dunia. Konsep mengenai *Multi-Track Diplomacy* sebenarnya adalah sebuah ekspansi dari paradigma *Track One (Government)* dan *Track Two (Non Government)* yang telah membentuk kajian bidang ini dalam beberapa dekade terakhir. Dalam perkembangan sejarahnya, konsep mengenai kedua jalur ini berawal dari sebuah kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal, ofisial dan antar-pemerintah diantara perwakilan yang ditugaskan oleh Negara berdaulat masing-masing merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional yang mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik atau perbedaan. Bahkan Warga Negara biasa dari berbagai macam latar belakang dan keahlian bisa menghadirkan sesuatu yang kredibel dan dapat membuat suatu perubahan (Djelantik, 2004 : 352-365).

Mark Leonard menjelaskan bahwa di dalam diplomasi publik terdapat sebuah hubungan antara *image* dan *issue*. Pada setiap negara memiliki isu-isu berbeda dengan negara lain yang berkembang pada negaranya masing-masing.

Isu-isu yang ada pada umumnya mempengaruhi hubungan negara dengan lingkungan domestik maupun internasional (Leonard, 2002 : 8).

Menurut Nye, terdapat tiga dimensi dari diplomasi publik. Yang pertama yakni komunikasi harian yang melibatkan penjelasan mengenai konteks keputusan kebijakan domestik maupun luar negeri. Dalam era internet dengan mebanjirnya informasi, dimensi ini penting dalam menekankan dan menjelaskan posisi pemerintah terutama dalam persiapan menhadapi krisis dimana komunikasi yang digencarkan pemerintah diharapkan menjadi yang utama dibanding dengan konten yang muncul yang berseberangan dengan nilai-nilai negara. Dimensi kedua adalah komunikasi strategis yang mengembangkan seperangkat tema sederhana, sebagaimana yang ada dalam kampanye politik atau iklan. Kampanye ini mencanangkan acara simbolis atau komunikasi tematis pada sepanjang tahun tertentu untuk menciptakan merek dari tema sentral atau untuk meningkatkan kebijakan tertentu dari pemerintah. Dimensi ketiga dari diplomasi publik menurut Nye adalah membangun hubungan jangka panjang yang kekal dengan tokoh-tokoh kunci selama bertahun-tahun atau bahkan dekade, baik melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, maupun akses terhadap media (Nye, 2004 : 107-111).

Dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut. Pertama, faktor eksternal misalnya terdiri dari struktur sistem internasional, karakteristik ekonomi dunia, kebijakan dan tindakan aktor lain, permasalahan global dan regional yang diakibatkan oleh aktivitas swasta, serta hukum dan opini internasional. Kedua, faktor internal yang

berasal dari dalam negeri misalnya kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan, karakteristik topografi dan geografis, atribut nasional negara, struktur dan filosofi pemerintah, opini publik, birokrasi, dan pertimbangan etis. Dalam mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan nasional, berbagai sarana digunakan sebagai instrumen yang direfleksikan oleh kebijakan luar negeri. Diplomasi sendiri di sini adalah *instrument* yang digunakan oleh aktor internasional, terutama negara, untuk menerapkan kebijakan luar negerinya.

Interaksi antara olahraga dan diplomasi bukanlah sesuatu yang baru. Secara historis, olahraga dan diplomasi sangat berkaitan seperti yang dicontohkan oleh festival Olimpiade kuno di kota-kota Yunani yang dipandang sebagai "kendaraan untuk menyatukan dunia yang beradab terlepas dari perbedaan politik"(Goldberg, 2000 : 63-70). Pada zaman modern, tim olahraga nasional telah digunakan sebagai alat diplomasi bagi sebuah negara sebagai perwakilan atau representasi untuk negara mereka atau sebagai sinyal protes (Faizullaev, 2013 : 91-114).

Sejak olimpiade kuno pertama, olah raga sudah dijadikan sebagai alat untuk menyatukan bangsa-bangsa beradab walaupun memiliki perbedaan politik. Bahkan dalam piagam olimpiade terdapat keinginan untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang lebih damai dan lebih baik. Meski dikatakan olahraga harus terbebas dari politik, pada kenyataannya tidak hanya olahraga terkadang memiliki tujuan politik, tapi mereka juga dipengaruhi oleh politik, misalnya bagaimana konflik politik telah lama muncul dalam olah raga, seperti komunisme melawan kapitalisme yang kental saat perang dingin. Ideologi di dalam kompetisi

atletik ini paling nyata terlihat pada era Perang Dingin, Perang Dingin memberikan pelajaran bagaimana olahraga dapat merepresentasikan kompetisi yang melampaui arena bermain, menjadi forum untuk menunjukan ketidaksetujuan sebagaimana mendemonstrasikan dan memvalidasi kepercayaan (Goldberg, 2000 : 64-65). Menurut Mark Leonard dalam *"Diplomacy by Other Means",* publik diplomasi sendiri seharusnya mengenai bagaimana membangun suatu hubungan yang dimulai dengan memahami kebutuhan, budaya, dan masyarakat lalu mencari area untuk menciptakan tujuan bersama (http://www.foreignpolicy.com/articles/2002/09/01/diplomacy_by_other_means?page=full diakses pada 27 Oktober 2015).

Memasuki abad 21, olah raga tidak dibingkai oleh ideologi lagi namun menjadi bagian penting dari alat diplomasi publik suatu negara. Acara olahraga yang menampung jumlah pengunjung asing memiliki dampak hubungan negara dengan publik asing pada skala yang sulit dijangkau oleh diplomat sendiri. Fakta bahwa olahraga meraih begitu banyak penonton adalah bagian dari daya tarik publik luas, namun juga alasan mengapa organisasi dan pemerintah mencoba untuk mengaitkan diri mereka pada acara, tokoh, dan tim populer yang menaikan posisi mereka di mata yang lain (http://theafricanfile.com/politicshistory/sports-diplomacy-and-apartheid-south-africa/ diakses pada 27 Oktober 2015).

Barry Sanders dalam *"Sport as Public Diplomacy"* melihat bahwa olahraga adalah media kuat dan besar untuk penyebaran informasi, reputasi, dan hubungan internasional yang adalah inti dari diplomasi publik. Besaran minat dari audiens global dan tingkat ketertarikan mereka pada olahraga melebihi subjek

lainnya termasuk dalam masalah politik. Olahraga bagi mereka bisa juga sebagai sarana refreshing. Sifat olahraga sendiri dalam mencari keunggulan dalam kompetisi membawa pesannya tersendiri. Olahraga juga menjadi kendaraan yang baik untuk menyebarkan pesan. Suatu strategi diplomasi publik yang terencana dapat mengkapitalkan kesempatan yang diberikan oleh olahraga(http://uscpublicdiplomacy.org/index.php/pdin_monitor/article/international_sport_as_public_diplomacy/ diakses pada 27 Oktober 2015).

Olahraga dapat menunjukkan aktor-aktor non-negara yang memiliki citra kuat sehingga ia menggantikan citra ataupun stereotip negatif yang mungkin melekat pada negaranya. Dengan nilai-nilai olahraga dipahami secara universal, ia dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukan kebersamaan dan mendekatkan masyarakat dengan latar belakang berbeda. Meski olahraga tak dapat serta merta memperbaiki konflik berkepanjangan antar negara, namun ia dapat digunakan untuk mendemonstrasikan persamaan dan dapat mengikat masyarakat lebih erat (Goldberg, 2000 : 65-67).

2.1.5 Pariwisata

Pariwisata merupakan sejumlah hubungan-hubungan dan gejala-gejala yang dihasilkan dari tinggalnya orang-orang asing, asalkan tinggalnya mereka itu tidak menyebabkan timbulnya tempat tinggal serta usaha-usaha yang bersifat permanen sebagai usaha mencari kerja penuh. Menurut beberapa ahli, definisi pariwisata yaitu :

> “Perpindahan sementara yang dilakukan dengan tujuan dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Wisatawan melakukan aktivitas selama mereka tinggal di tempat tujuan wisata dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan’’(Marpaung, 2002:17).

Badrudin (2001) mendefinisikan pariwisata sebagai perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian atau kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial,budaya, alam dan ilmu.

Penanaman modal yang tinggi di industri jasa serta upaya revitalisasi kota-kota pada masa post-industrialisasi ini memotivasi pemerintah kota untuk mengembangkan pariwisata sebagai stimulus utama bagi perbaikan ekonomi lokal dan regional (Roche dalam Page, 2003: 28). Pariwisata juga diharapkan dapat memacu perubahan-perubahan kondisi politik kota sehingga dapat membangkitkan kembali daya tarik lingkungan untuk investasi (Doorne dalam Page, 2003: 28).

European Commission, Tourism Unit (2002) mengungkapkan bahwa pariwisata menjadi landasan kebijakan pengembangan perkotaan yang mengkombinasikan sediaan atau *supply* yang kompetitif sesuai dengan harapan pengunjung dengan kontribusi positif terhadap pembangunan kota dan kesejahteraan penduduknya. Pariwisata secara singkat dapat dirumuskan sebagai kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000 : 2).

Dampak yang disebabkan oleh pariwisata beragam. Negara merupakan aktor paling penting dalam membangun industri pariwisata dengan memperhitungkan kepentingan politik, ekonomi hingga kepentingan kebudayaan.

Dalam Hubungan Internasional Pariwisata dikenal setelah berakhirnya perang dingin sebagai salah satu dari *soft diplomacy*. Pariwisata kini telah

berkembang secara global dan berubah menjadi sebuah industri yang menjanjikan namun walau bagaimanapun juga berisiko, paling tidak kini pariwisata telah berarti bagi perekonomian sebuah negara.

Menurut Prof. Hunzieker dan Prof. K. Krapf, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara (Soekadijo, 2000 : 12).

2.2 Kerangka Pemikiran

Saat ini sepak bola tidak hanya olahraga yang dimainkan secara regional, akan tetapi seiring arus globalisasi sepak bola berkembang merambah dunia internasional melalui ajang atau kompetisi antar bangsa salah satunya Piala Dunia yang diselenggarakan oleh FIFA. Setelah berakhirnya perang dingin, pariwisata menjadi suatu hal yang dipandang penting oleh negara sebagai *soft diplomacy* untuk mencapai kepentingannya dimana alasan ekonomi menjadi tujuan utama sebuah negara dalam memajukan pariwisatanya. Era globalisasi saat ini menuntut negara-negara untuk mengikuti arus teknologi dan informasi yang sudah berkembang dan mulai meningkatkan kemampuan diplomasinya dari berbagai aspek, hal ini ditandai dengan perubahan isu-isu hubungan internasional pasca perang dingin yang awalnya cenderung kepada isu politik dan kemanan menjadi isu HAM, sosial, lingkungan hidup, hingga pariwisata seperti yang diungkapkan (Perwita dan Yani,2005:7).

Sebuah negara akan berusaha melakukan segala cara dalam melaksanakan politik luar negeri untuk mengejar tujuannya, Afrika Selatan berusaha untuk melakukan diplomasi publik pada penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2010. Dimana politik luar negeri ini dilakukan dalam rangka mengejar kepentingan nasionalnya di sektor pariwisata, seperti yang dikemukakan oleh (Perwita & Yani, 2005:47-48).

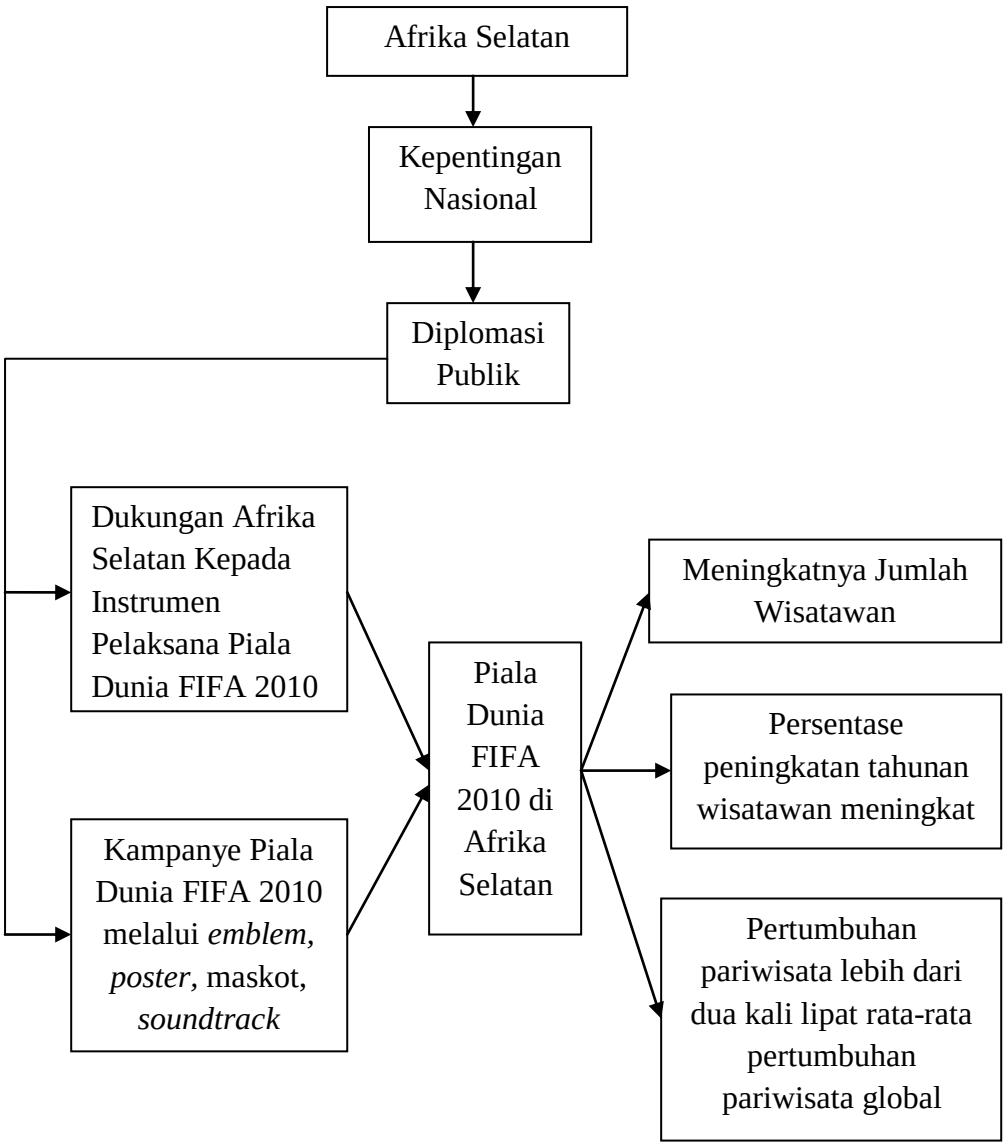
Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, tergantung dari kondisi yang mengharuskan suatu negara menerapkan politik luar negeri demi mendapatkan kepentingan nasionalnya. Afrika Selatan memiliki kepentingan nasional dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2010 yang diselenggarakan di negaranya dengan berusaha meningkatkan sektor pariwisatanya. Hal ini perlu diperjuangkan oleh Afrika Selatan jika ingin mencapai tujuan kepentingan nasionalnya dalam sektor pariwisata, seperti yang diungkapkan oleh (Perwita dan Yani, 2005: 41).

Dalam melakukan politik luar negerinya, Afrika Selatan melakukan diplomasi agar dapat mencapai kepentingan nasionalnya melalui ajang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan. Turnamen sepak bola tersebut berusaha dimanfaatkan dengan baik oleh Afrika Selatan dengan melakukan diplomasi. Diplomasi sendiri merupakan alat yang dapat digunakan bagi suatu negara untuk melaksanakan politik luar negeri. Hal ini dikemukakan (Djelantik, 2008: 4).

Afrika Selatan melalui Piala Dunia FIFA 2010 berusaha untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa Afrika Selatan memiliki kekayaan

alam yang berlimpah dan pantas untuk dijadikan negara tujuan pariwisata dunia. Upaya penyampaian pesan melalui diplomasi publik ini bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat internasional sebagaimana yang diungkapkan oleh (Susetyo dalam Shoelhi, 2011 : 158).

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi Afrika Selatan, perkembangan sektor pariwisata di Afrika Selatan dapat dilihat dari jumlah wisatawan yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melakukan kegiatan wisata dan mampu membantu perekonomian Afrika Selatan. Piala Dunia merupakan kompetisi sepak bola terbesar di dunia yang melibatkan negara-negara anggota FIFA yang mampu menyedot perhatian seluruh dunia, hal demikian yang berusaha dimanfaatkan oleh Afrika Selatan melalui diplomasi publiknya untuk mempromosikan pariwisatanya selaku tuan rumah dari Piala Dunia yang diadakan oleh FIFA pada tahun 2010. Akibat dari besarnya minat orang-orang untuk mendukung tim favoritnya atau hanya sekedar menonton pertandingannya, hal ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pariwisata negara yang menjadi tuan rumah dengan datangnya para wisatawan mancanegara seperti yang diungkapkan oleh (Soekadijo, 2000 : 30).



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran